

Partisipasi Perempuan dalam Ranah Politik Lokal: Kajian Sosial Politik di Klaten Jawa Tengah

Ririh Megah Safitri¹

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang, Indonesia

[1ririh.megah.safitri@uinwalisongo.ac.id](mailto:ririh.megah.safitri@uinwalisongo.ac.id)

Abstract

Women's participation in the political sphere is a response from government policies related to 30% women's quota. The dynastic political label attached to political activities in Klaten became an element of influence over the survival strategy undertaken by women cadres. This research uses descriptive qualitative method. The purpose of this study is to explain the participation of women political cadres related to representation, relations and power in the local political sphere. The results of the study showed that conditions that did not prioritize women were not created in political activities due to socio-cultural factors and stereotypes inherent in women, but the local political sphere was able to become a space for female political cadres to express their existence.

Keywords: *Participation, Women, Politics, Local.*

Abstrak

Partisipasi perempuan di ranah politik merupakan respon dari kebijakan pemerintah terkait 30% kuota perempuan. Label politik dinasti yang melekat pada aktivitas politik di Klaten, menjadi unsur pengaruh atas survival strategy yang dilakukan oleh para kader perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan tentang partisipasi para kader politik perempuan terkait representasi, relasi dan kuasanya dalam ranah politik lokal. Hasil penelitian menunjukkan belum tercipta kondisi yang mengutamakan perempuan dalam aktivitas politik karena faktor sosial budaya dan stereotype yang melekat pada perempuan, namun ranah politik lokal telah mampu menjadi ruang bagi kader politik perempuan untuk mengekspresikan eksistensinya.

Kata Kunci: partisipasi, Perempuan, Politik, Lokal.

Pendahuluan

Kompleksitas ranah politik yang sarat dengan eksklusifitas telah menjadi ruang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dan menunjukkan eksistensi diri. Partisipasi perempuan dalam ranah politik sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait penetapan kuota perempuan sebesar 30%. Apresiasi atas kebijakan tersebut terepresentasi dalam keterlibatan perempuan dalam aktivitas kepartaian, baik secara formal maupun informal. Terlepas dari berbagai dinamikanya perempuan telah berupaya mengambil peran dan menghadirkan kepentingannya dalam aktivitas kepartaian (Ardiansa, 2017). Sosialisasi pengelolaan dan pengembangan partai politik dengan berbagai aktifitasnya secara masif melalui media massa menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi meningkatnya partisipasi perempuan dalam ranah politik. Isu terkait politik selalu menjadi bahan pemberitaan utama dalam media massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Sehingga secara tidak langsung masyarakat digiring untuk selalu tahu dan terlibat dalam berbagai percaturan politik, setidaknya melalui informasi-informasi yang telah terdiseminasi melalui media massa termasuk media sosial (Susanto, 2017). Berbagai fenomena-fenomena politik tidak hanya berlangsung dalam ranah nasional saja, namun berbagai strategi politik juga terjadi pada tingkat lokal atau daerah. Seperti halnya dalam berbagai bentuk usaha politik yang terjadi pada tingkat daerah yang akan menjadi satu isu utama.

Strategi politik yang terjadi dalam tingkat lokal terepresentasi melalui fenomena-fenomena riil seperti proses pemilihan legislatif. Sistem demokrasi telah menuntut banyak keterlibatan dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan. Sejalan dengan itu, sistem demokrasi di Indonesia telah memberikan ruang kepada para perempuan untuk turut terlibat dan berkiprah dalam berbagai kegiatan politik. Pada konteks ini ruang yang dimaksud yakni adanya kebijakan kuota minimal 30% khusus bagi perempuan telah diaktualisasikan oleh para perempuan di daerah yang ditinjau melalui keterlibatan perempuan dalam pemilihan legislatif pada tingkat kabupaten.

Urgensi atas keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik lokal dalam konteks ini ditinjau melalui kerangka DPRD (Kabupaten) merujuk pada tiga hal. Pertama terkait dengan representasi kader perempuan dalam kegiatan politik di Klaten. Eksistensi peran dan fungsi para kader

perempuan menjadi krusial mengingat label politik dinasti yang telah melekat di Kabupaten Klaten. Para kader perempuan berupaya mengkonstruksi identitas khusus di ranah publik sebagai respon dan strategi atas label tersebut. Kedua, merujuk pada aspek relasi yang dibangun guna mengoptimalkan perolehan hasil suara dalam proses pelaksanaan pemilihan legislatif. Pentingnya relasi sosial tidak hanya menentukan proses pemenangan hasil suara namun juga turut mensukseskan pelaksanaan program kerja calon legislatif terpilih. Ketiga, menitikberatkan pada ruang kuasa yang melekat pada masing-masing calon keagiatif pasca proses pemenangan dalam konteks pemilihan umum.

Kajian atas partisipasi perempuan dalam ruang politik lokal pada umumnya cenderung berfokus pada kelemahan dan ketimpangan peran perempuan dalam aktivitas kepartaian sebagai dampak dari stereotype negatif yang melekat pada perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melengkapi kajian terdahulu dengan berdasar pada tiga rumusan permasalahan, antara lain: a) Bagaimana representasi perempuan dalam konteks politik lokal di Klaten? b) Bagaimana signifikansi relasi sosial dalam proses keterlibatan perempuan dalam konteks politik lokal di Klaten? c) Bagaimana konstruksi ruang kuasa perempuan dalam konteks politik lokal di Klaten?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Muhammad Natsir (1983) metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu situasi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas penelitian pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan-hubungan antarfenomena yang diteliti. Melalui pendekatan deskriptif, peneliti berusaha menguraikan tentang representasi perempuan dalam hubungan relasi sosial dan kuasanya untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Adapun metode pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara dan kajian literatur yang sesuai dengan fokus tema penelitian.

Tinjauan Sosial Ekonomi dan Politik Kabupaten Klaten

Pada umumnya, Klaten lebih dikenal sebagai kota singgah. Pada konteks ini Klaten ditempatkan sebagai kota 'antara', yakni berada diantara dua kota besar Solo dan Yogyakarta. Keberadaannya yang 'antara' tersebut telah mendorong Kabupaten Klaten mengencangkan upaya perkembangan sumber daya manusia berikut dengan berbagai perkembangan perekonomiannya. Berbagai program yang mengarah pada perbaikan dan pengembangan Klaten mulai terlihat, seperti perbaikan infrastruktur (taman kota, jalan, trotoar, tugu di beberapa jalan protokol, dll); perbaikan dalam peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan pelayanan kesehatan dan berbagai bentuk pelayanan publik lainnya. Beberapa program tersebut tampaknya sangat direspon oleh masyarakat Klaten dengan mengapresiasi berbagai kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Klaten. Bahkan di sisi lain, apresiasi dari masyarakat tersebut terwujud dalam bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan termasuk dalam ranah politik. Pada konteks ini masyarakat tidak hanya memosisikan diri sebagai warga masyarakat yang mengapresiasi berbagai bentuk kebijakan namun juga memosisikan diri sebagai aktor yang berperan langsung dalam berbagai pelayanan publik tersebut. Salah satu wujud partisipasi aktif tersebut merujuk pada tokoh-tokoh pemangku pemerintahan Kabupaten Klaten, termasuk DPRD.

Posisi dan peran sebagai DPRD menjadi salah satu jabatan yang dieksklusifkan oleh masyarakat. Faktanya tingkat keikutsertaan masyarakat dalam berbagai bentuk pemilihan legislatif tersebut termasuk tinggi. Mengingat luas wilayah administratif Kabupaten Klaten yang cukup luas. Terdapat 7 daerah pilihan (dapil) di Kabupaten Klaten. Penelitian ini fokus pada dapil 3 yang menjadi area untuk meninjau dinamika politik Kabupaten Klaten secara keseluruhan. Dapil 3 meliputi Kecamatan Karangnom, Kecamatan Jatinom, Kecamatan Tulung dan Kecamatan Polanharjo. Meskipun wilayah dapil 3 (empat kecamatan) berlokasi di wilayah pinggiran Klaten, tepatnya di bagian perbatasan Boyolali-Klaten namun tidak menjadikan dapil 3 sebagai suatu dapil yang stabil termasuk kesederhanaan permasalahan politiknya. Jika ditinjau dengan berdasarkan pada lokasi, memang keempat kecamatan tersebut tidak sekompleks dapil-dapil lain yang berlokasi di wilayah kecamatan kota Klaten. Akan tetapi, masyarakat yang tinggal di keempat kecamatan

tersebut telah memiliki dinamika-dinamika kehidupan sosial dan politiknya. Seperti halnya Kecamatan Karangnom dan Kecamatan Jatinom.

Pada umumnya, Jatinom dan Karangnom dikenal sebagai suatu area yang tingkat perkembangannya cukup pesat. Asumsi tersebut berdasar pada situasi di sepanjang jalan utama Jatinom dan Karangnom berjajar berbagai macam toko dan jenis usaha ekonomi (mayoritas sebagai pedagang) mulai dari pasar tradisional, swalayan, supermarket, toko pakaian, toko sepatu, toko jilbab, toko tas, toko emas, toko alat elektronik, toko mainan, toko bangunan hingga pada berbagai penjual makanan baik yang menjual makanan kering maupun makanan besar dengan berbagai menu pilihan. Selain itu di wilayah Jatinom terdapat satu pasar tiban yang jatuh pada hari legi dalam penanggalan Jawa, di mana semua orang dari berbagai desa datang untuk membeli barang-barang yang ditawarkan dengan harga murah. Dengan demikian secara tidak langsung Jatinom dan Karangnom telah menjadi pusat atas berbagai kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah Klaten pinggiran. Kondisi tersebut telah mengkonstruksi suatu tatanan sosial dalam masyarakat, bahkan ekspresi atas perbedaan stratifikasi-stratifikasi ekonomi sosial masyarakat sangat kentara. Pada umumnya, masyarakat di kedua kecamatan tersebut berprofesi sebagai seorang pedagang dan petani disamping usaha atau bisnis yang tengah dikembangkan.

Tidak seperti Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Karangnom, Kecamatan Polanharjo dan Kecamatan Tulung bukan menjadi pusat atas berbagai kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Kecamatan Tulung dan Polanharjo justru menjadi kecamatan destinasi pariwisata. Mengingat terdapat beberapa obyek wisata seperti pemandian umum Ponggok, Cokro, Pemancingan Janti, Kampung Lele dan beberapa umbul-umbul lainnya. Oleh karena itu, hampir sebagian besar masyarakat bekerja sebagai wiraswasta dan petani. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keempat kecamatan tersebut memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, perebutan kursi DPRD khususnya dari dapil 3 seringkali dipersaingkan secara ketat. Merujuk pada salah satu kasus pencalonan salah satu warga dari Kecamatan Tulung yang bermaksud menjadi calon legislatif dari salah satu partai politik. Terdapat 3 perempuan yang memperebutkan kursi DPRD dengan satu latar belakang partai yang sama melalui dapil 3. Berbagai bentuk kampanye di dapil 3 kala itu sangat bervariasi, mengingat kondisi sosial ekonomi dan

budaya dari masing-masing lokasi tersebut juga sangat bervariasi. Oleh karena itu, muncul penyesuaian-penyesuaian strategi yang dilakukan oleh para calon legislatif. Pada akhir pemilihan hanya ada satu caleg yang berhasil lolos dan duduk di kursi DPRD untuk menampung aspirasi dan melayani masyarakat pada umumnya.

Representasi Perempuan dalam Pilihan Legislatif

Layaknya kandidat politik pada umumnya, para perempuan yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif juga melakukan berbagai upaya untuk mengaktualisasikan dirinya ditengah publik. Upaya-upaya yang berhubungan dengan kegiatan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengkonstruks identitas sosial yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam proses seleksi (Herdiansyah dalam Fernandes, 2019). Identitas dari individu akan sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan politik yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, konstruksi identitas atas individu menjadi salah satu aspek yang harus selalu diperhatikan (Safitri, 2018). Merujuk pada konsep Antonio Giddens (1991) terkait dengan konstruksi identitas yang menekankan bahwa “..self-identity is formed by the ability to sustain a narrative of the self that builds up a consistent feeling of biographical continuity and answer the critical questions “what to do? who to be ? How to act?”. Terkait dengan konteks ini terdapat 3 poin penting yang perlu diuraikan. Poin pertama terkait dengan representasi diri dari calon legislatif tentu saja merujuk pada isu identitas pribadinya sebagai siapa dia dalam suatu masyarakat. Biasanya konsep ini merujuk pada cerita terkait dengan latar belakang pribadi dan keluarganya. Masyarakat pada umumnya akan melihat caleg tersebut berasal dari keluarga dan lingkungan yang bibit, bobot dan bebetnya telah diakui. Konsep-konsep kekerabatan tersebut, pada dasarnya menitik beratkan pada satu aspek di awal yakni origin structure, dimana keturunan kekerabatan tersebut akan berpengaruh pada konstruksi sosial individu dalam masyarakat (Fox,1998). Kondisi prasyarat atas konstruksi identitas tersebut merujuk pada serangkaian dinamika strategi politik salah satu calon legislatif politik dari dapil 3 Klaten.

Taviv merupakan seorang caleg dari dapil 3 yang maju dengan menginduk pada salah satu partai besar meskipun masih baru. Periode 2014 bukanlah kali pertama bagi ia untuk maju sebagai calon legislatif yang maju dari dapil 3. Selain itu tahun 2014 juga bukan kali pertama ia

terjun ke dunia perpolitikan. Sejak tahun 1997 malah ia telah terjun langsung dalam percaturan politik ditingkat lokal. Dua periode menjadi kepala desa menjadi pengalaman dan modal utama dalam maksud peningkatan karirnya sebagai aktifis politik di Kabupaten Klaten. Keberhasilan yang melekat dalam dirinya tidak terlepas dari peran individu lain yang berada di belakangnya. Ia lahir dari keluarga perangkat desa, ayahnya adalah 'bayan' pada masanya, sehingga masyarakat pada umumnya sudah tahu betul asal usul dan cara kepemimpinan ayah Taviv sebagai 'bayan'. Dengan demikian secara tidak langsung, Taviv telah di treatment masyarakat atas pengaruh ayahnya sebagai 'bayan' yang nampak sangat dihormati oleh masyarakat. Posisi kepolitikan Taviv dalam keluarga juga dilegitimasi oleh keberadaan kakak laki-lakinya yang pada saat itu telah mampu kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik di UGM. Ide-ide terkait dengan situasi-situasi terkini dalam percaturan politik di Indonesia didapatkannya dalam diskusi-diskusi yang baik secara sengaja atau tidak sengaja didengarnya di rumah. Bahkan dulu ia sering dilibatkan dalam berbagai diskusi tersebut. Sehingga wacana yang telah berkembang di kalangan masyarakat adalah Taviv memang lahir dari keluarga yang sangat concern sekali dengan urusan politik. Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan tentang "social influence of family and peers to shape materialistic orientation" (Inglehart, 1990). Konsep keturunan atau presenden tidak hanya terkait dengan identitas sosial individu saja, melainkan juga menyangkut konsep pembedaan sosial terkait dengan relasi asimetris yang diidentifikasi sebagai karakteristik dalam masyarakat (Vischer, 2009). Keluarga memang menjadi rujukan pertama dalam berbagai bentuk konfirmasi atas berbagai persoalan.

Poin penting yang kedua merujuk pada berbagai bentuk kampanye yang telah dilakukan oleh para caleg khususnya perempuan dalam rangka memenangkan suara pada pilihan legislatif 2014 di DPRD Klaten. Berbeda dengan sistem kampanye di periode sebelumnya yakni pada tahun 2007, kini para caleg perempuan berupaya untuk memodifikasi sistem-sistem kampanyenya tentu saja dengan berdasar pada trend yang tengah berkembang. Pada periode pencalonannya, Taviv menggunakan media printing sebagai salah satu cara untuk mendiseminasikan namanya di 4 kecamatan dapilnya. Baliho-baliho dengan gambar dirinya berikut dengan berbagai atribut kepartaiannya telah terpasang di sepanjang jalan-jalan protokol di keempat wilayah kecamatan tersebut. Menurutnya cara tersebut dipakai supaya masyarakat mengenal Taviv sebagai salah satu

kandidat DPRD Klaten melalui dapil 3. Setidaknya, masyarakat mengetahui nama dan nomor urut dari Taviv Hidayati. Selain baliho dengan gambar dirinya, Taviv juga menggunakan leaflet-leaflet kecil yang dibagi-bagikan kepada setiap warga di dapil 3 yang ia temui. Sejalan dengan itu stiker-stiker yang bergambarkan foto dirinya dan atribut kepartaiannya juga menjadi salah satu alat yang tidak pernah ditinggalkannya selama masa kampanye. Pada dasarnya berbagai bentuk media yang digunakannya merupakan sebuah wujud atas upaya pendekatan untuk mendapatkan simpati dari masyarakatnya. Praktisnya berbagai bentuk media tersebut berfungsi untuk mengenalkan Taviv pada masyarakat pada umumnya.

Poin ketiga merujuk pada berbagai kegiatan dan FGD yang dilakukan bersama dengan masyarakat di wilayah dapil 3. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan visi misi dan program kerja yang telah direncanakan oleh para caleg perempuan. Pada konteks ini masyarakat diajak untuk lebih dekat dan tidak hanya ikut memilih tanpa mengetahui visi misi dan program kerja dari caleg yang dipilihnya. Dengan demikian, masyarakat juga diorientasikan untuk ikut bertanggungjawab atas pilihannya esok. Biasanya kegiatan-kegiatan yang mengarah pada bentuk sosialisasi pencalonan dan kepartaiannya akan merujuk pada organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat, seperti karang taruna, remaja masjid, kelompok dasawisma, PKK dan kelompok-kelompok lain yang sejenis. Melalui sosialisasi visi misi dan program kerja tersebut diharapkan dapat dijadikan pertimbangan utama dalam pengumpulan suara. Pencalonannya sebagai calon legislatif faktanya juga telah membuat salah satu calon legislatif lebih aktif dan partisipatif dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Pada dasarnya berbagai upaya yang dilakukannya bertujuan untuk merepresentasikan dirinya dalam ranah publik untuk menjangkau suara-suara pada saat hari pengumpulan suara.

Bangunan Relasi Politik: Modal Sosial yang Menjanjikan

Keterlibatan dan kualitas individu dalam ranah politik tidak hanya dilihat melalui visi misi dan program kerja yang dimiliki oleh para calon-calon legislatif perempuan saja melainkan juga terkait dengan bangunan relasi politik yang dibangunnya. Pada konteks ini, struktur relasi yang dimiliki oleh seorang calon legislatif perempuan akan dapat mempengaruhi keefektifan dari berbagai keberhasilannya baik pada masa

kampanye ataupun pada masa pelaksanaan program kerja pasca pemilihan. Relasi-relasi yang telah terbangun tersebut biasanya merupakan hasil atas interaksi-interaksi sosial yang telah terbangun sebelumnya. Oleh karena itu jenjang karir politik para caleg perempuan tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat, melainkan membutuhkan proses yang panjang untuk membangun sebuah kontrak relasi diantara mereka. Dengan demikian, relasi politik menjadi satu aspek yang turut berpengaruh dalam keterlibatan individu dalam berbagai kegiatan politik. Pernyataan tersebut merujuk pada Putnam (1993) yang melihat bahwa relasi merupakan sebuah bagian dari modal sosial yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat karena mampu memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi.

Begitu halnya dengan Taviv sebagai salah satu caleg perempuan yang telah membangun suatu relasi bahkan sejak ia menjabat sebagai lurah selama 15,5 tahun yang lalu. Perannya sebagai lurah kala itu telah membuat Taviv bertemu dengan berbagai kolega dalam rangka menyelesaikan agenda-agenda dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Disamping itu berbagai bentuk pengajuan program pengembangan desa juga telah membuat Taviv secara tidak langsung memiliki struktur relasi di pemerintah pusat. Sehingga pencalonannya sebagai calon legislatif DPRD Klaten bukanlah sesuatu hal yang baru menurut perspektif relasi-relasinya. Pada konteks ini terdapat 2 jenis bangunan relasi yang dimiliki Taviv pada saat mencalonkan dirinya sebagai caleg perempuan dari dapil 3. Pertama yakni bangunan relasi yang merujuk pada staff pemerintahan yang bertugas di pusat. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran dan eksistensinya selama 15,5 tahun menjabat lurah telah membuat Taviv terbiasa dan merasa tidak asing lagi dengan berbagai birokrasi yang ada di pemerintahan pusat, termasuk dengan beberapa staffnya. Oleh karena itu, pencalonannya dalam pilihan legislatif kemarin mendapatkan suatu sumbangan dari para relasi tersebut. Salah satu contoh atas adanya sumbangan tersebut misalnya, pada saat Taviv mendapatkan suntikan-suntikan dana dari salah satu aktor tersebut. Selain dana, Taviv juga mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi terkait dengan pencalonannya. Mungkin saja berbagai bentuk kemudahan tersebut tidak selalu dimiliki oleh para calon-calon legislatif perempuan yang lain.

Jenis relasi yang kedua merujuk pada hubungannya dengan tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Pada konteks ini tokoh yang dimaksud

tidak harus merujuk pada tokoh yang memiliki jabatan struktural melainkan juga pada individu-individu yang berpengaruh dalam masyarakat. Kehadiran berbagai tokoh-tokoh tersebut oleh Breman (1980) disebut dengan konsep intermediaries dalam bahasannya tentang masyarakat Jawa dimana para intermediaries berlaku sebagai penghubung yang dalam konteks ini merujuk pada calon legislatif dan masyarakat yang menjadi target pengumpulan suara. Reputasi keluarga dan interaksi yang telah dibangunnya selama ini faktanya telah membuat calon legislatif perempuan dikenal dan dihormati oleh sebagian besar masyarakat disekitarnya. Berdasar atas berbagai 'kenalan' tersebut para caleg perempuan membangun struktur-struktur relasi sebagai modal pencalonannya sebagai calon legislatif. Tokoh-tokoh yang dikenal tersebut yang dipanggil pertama kali saat melalukan kampanye ke desa-desa, khususnya desa yang bersangkutan dari masing-masing tokoh tersebut. Selain karena sudah kenal, partisipasi dari para tokoh tersebut juga bertujuan untuk menggalang suara dari masyarakat yang ada di sekitar tokoh-tokoh tersebut. Seperti halnya proses kampanye yang dilakukan Taviv di Desa KembangSari, Sorogaten, Tulung. Di desa tersebut Taviv telah mengumpulkan beberapa tokoh penting yang dianggap dapat memberikan pengaruh dan mengajak masyarakat yang lain. Tokoh-tokoh yang dimaksud yakni Ketua RT. 14, Ketua Rw 06, Ketua Pemuda, Pengurus Takmir Masjid dan beberapa individu yang kerap 'nongkrong' disudut-sudut desa bersama rombongan anak-anak muda lainnya. Pendekatan kepada beberapa orang tersebut tentu saja tidak bersifat praktis meskipun telah didasari atas rasa kenal. Melainkan tetap memperhatikan setiap proses dan perkembangan yang terjadi pasca kontrak kerjasama tersebut dibuat.

Bangunan–bangunan relasi yang dimiliki tidak hanya merujuk pada tokoh-tokoh yang dianggap penting dan berpengaruh saja, melainkan juga merujuk pada anggota-anggota masyarakat lain yang dianggap berpotensi untuk diajak bergabung dan bekerjasama menggalang suara saat pemilihan. Biasanya langkah ini sering digunakan diwilayah yang kurang ia kenal. Pada konteks ini, biasanya para caleg perempuan akan mengundang 5-10 orang perdesa untuk melakukan FGD dan makan bersama sembari menyampaikan visi misi dan program kerja yang ia miliki. Pada akhirnya tujuannya sudah pasti yakni penggalangan suara pada saat pemilihan sedang berlangsung. Jenis bangunan relasi ini nampak sangat efektif diterapkan dalam proses kampanye, mengingat

power yang dimiliki oleh para tokoh-tokoh 'perantara' tersebut faktanya mampu untuk mempengaruhi dan mengajak anggota-anggota masyarakat yang lain, setidaknya keluarga besar dari para tokoh tersebut. Dengan demikian dapat terlihat jelas bahwa relasi-relasi yang dimiliki oleh individu (pada konteks ini caleg) akan sangat berpengaruh pada efisiensi dan efektifitas proses kampanye dan pelaksanaan program kegiatan yang akan dilakukan nantinya.

Ruang Kuasa Perempuan dalam Ranah Politik Lokal

Representasi diri yang dilakukan oleh para calon legislatif perempuan dilakukan dengan berbagai cara dan relasi yang dimilikinya merupakan sebuah bentuk partisipasi masyarakat dalam ranah politik lokal. Relasi sosial yang telah terbentuk berikut dengan pengelompokan-pengelompokan sosial yang berlangsung pada proses kampanye telah mengkonstruksi suatu ruang kuasa sebagai dampak yang mengikuti kemenangannya dalam proses pemilihan umum. Ruang kuasa yang telah terbentuk akan terlegitimasi kedalam kultur yang ada dalam masyarakat.

Dunia politik sering dianggap menjadi sebuah peluang yang menjanjikan bagi sebagian orang, termasuk bagi Taviv Hidayati sebagai salah satu calon legislatif. Menurutnya posisi dan jabatan sebagai DPRD merupakan sebuah pekerjaan yang dinilai menjanjikan dengan hasil yang akan didapatkannya. Selain meningkatkan pendapatannya, profesi sebagai DPRD terpilih turut melekatkan social prestige dalam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan pada masa kampanye untuk mendapatkan jabatan dan posisi sebagai anggota DPRD. Pada dasarnya peran dan jabatan sebagai DPRD tidak hanya sebatas profesi yang dimiliki oleh para anggota DPRD. Namun disisi lain, peran dan jabatan sebagai DPRD telah memberikan satu ruang kuasa kepada individu yang mengembannya. Pasalnya para anggota DPRD tersebut yang akan merumuskan berbagai kebijakan-kebijakan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, baik disadari ataupun tidak disadari para anggota DPRD tersebut berkuasa atas kelangsungan kehidupan masyarakat pada umumnya melalui pilihan rumusan kebijakan yang ia tetapkan. Pandangan tersebut sejalan dengan Wisnumurti (2009) yang berasumsi bahwa politik sebagai sebuah terminologi mengandung arti sangat luas, batasan-batasan politik sebagaimana dirumuskan oleh para teoritis politik lazim diartikan sebagai upaya mengatur negara dan

melaksanakan pemerintahan melalui proses perebutan kekuasaan yang konstitusional dengan menggunakan kekuasaan yang diraih dan kekuatan yang dimiliki bagi kesejahteraan rakyat. Pada dasarnya ruang kuasa yang telah terkonstruksi tersebut akan memunculkan suatu otoritas-otoritas yang dimiliki oleh para calon legislatif perempuan terpilih atau yang dalam konteks ini merujuk pada anggota DPRD. Otoritas-otoritas yang dimiliki oleh para elit tersebut akan diwujudkan kedalam kekuasaan eksternal dan kekuasaan internal (Twikromo, 2009). Kekuasaan-kekuasaan tersebut yang nantinya akan terlihat dalam masa pemerintahannya. Oleh karena itu, posisi dan jabatan sebagai DPRD menjadi satu profesi yang selalu dikejar dan diupayakan dengan berbagai cara.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan-paparan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ranah politik sarat akan kompleksitas strategi dan penyelarasan tindakan. Wawasan politik yang mumpuni tidak menjadi jaminan keterpilihan pun kesuksesan karir politik dari para kader politik perempuan. Namun, faktor identitas diri, eksistensi kerabat hingga pada strategi sosialisasi menjadi faktor penentu lain atas keterpilihan para kader perempuan. Peran politik yang dijalankan selama menjabat di pemerintahan juga berkontribusi dalam strategi mencapai kesuksesan melalui kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Ternyata tidak hanya para aktor politik di lingkup nasional saja tetapi juga berbagai persoalan politik pelik dalam konteks Indonesia. Namun, kompleksitas dari politik juga terlihat dalam sistem politik lokal yang berada di daerah-daerah, seperti halnya tingkat Kabupaten. Kompleksitas tersebut telah nampak ketika para calon legislatif perempuan melakukan proses kampanye yang bertujuan untuk merepresentasikan dirinya, membangun relasi atau jaringan sosial hingga berujung pada konstruksi sebuah ruang kuasa.

Kajian terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap politik lokal yang ditinjau melalui kasus pencalonan legislatif tingkat kabupaten tersebut berujung pada sebuah kesimpulan. Kebijakan pemerintah menetapkan kuota perempuan sebesar 30% menjadi ruang bagi para kader politik perempuan untuk berperan dalam aktivitas perpolitikan. Namun, peran dan partisipasinya belum menjadi pengarusutamaan dalam

pengelolaan dan pengembangan partai politik. Implementasi atas kebijakan kuota perempuan 30% mensyaratkan para kader politik perempuan memiliki modal sosial yang kuat pula guna suksesi proses pemilihan umum. Oleh karena itu, jumlah kader perempuan terpilih masih terbatas jumlahnya karena tidak semua para kader perempuan mampu memenuhi semua tuntutan dan mampu bertahan dalam kultur patriarki dalam konteks pengelolaan kepartaian. Implementasi kuota 30% perempuan masih menjadi warna dalam pengelolaan dan kelembagaan politik, belum menjadi pengarusutamaan dalam konteks politik kepartaian.

Daftar Pustaka

- Ardiansa, D. (2017). Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik*. <https://doi.org/10.7454/jp.v2i1.82>.
- Nazir, Moh. 1992. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fernandes, A. (2019). *Politik Identitas dalam Pemilu 2019: Proyeksi dan Efektivitas*. Centre For Strategic and International Studies.
- Fox, James, J. 1988. *Origin, Descent And Precedence In The Study Of Austronesian Societies*. Public Lecture In Connection With De Wisselleerstoel Indonesische Studien Given On The 17th of March 1988. Leiden.
- Giddens, A. 1991. *Modernity and Self Identity*. Cambridge: Polity Press
- Herdiansah, A. G. (2017). *Politisasi Identitas dalam Kompetisi Pemilu di Indonesia Pasca 2014*. *Jurnal Bawaslu*.
- Inglehart, Ronald. 1990. *Culture Shift in Advanced Industrial Society*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, Robert D. 1993. *Making Democracy Work, Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Susanto, E. H. (2017). *Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik*. *Jurnal ASPIKOM*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>.
- Safitri, R. M. (2018). *Menjadi Perempuan Tambak Lorok: Konstruksi Gaya Hidup Perempuan Muslim Pesisir*. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2731>.
- Twikromo, Y. Argo. 2009. "Dalam Bayang-Bayang Rasionalisasi Perbudakan Kaum Ningrat: Sisa Ruang Bagi Perjuangan

- Kaum Budak di Wilayah Ujung Timur Sumba". Dalam Jurnal Renai (Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora), Tahun IX, No. 2, 2009. Halaman 135-167).
- Vischer, Michael P (ed). 2009. Precedence: Social Differentiation in The Austronesian World. ANU: ANU E Press.
- Wisnumurti, AA G Oka. 2009. Peta Politik Nasional dan Lokal. Makalah yang disampaikan dalam rangka Pendidikan dan Animasi Politik Kaum Muda se-Keuskupan Denpasar 23-25 Oktober, 23-25 November, 2009.